

Kecemasan Penyandang Disabilitas dalam Mencari Pekerjaan di Kawasan Wisata Kuta Bali

Dermawan Waruwu, Ni Ketut Jeni Adhi

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Universitas Dhyana Pura

Email: Email: dermawanwaruwu@undhirabali.ac.id

Abstrak. Penyandang disabilitas di Kabupaten Badung tahun 2017 terus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah Badung maupun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 kurang berpihak terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menjadi kelompok termarginalkan dan terhegemoni di tengah geliat industri pariwisata yang berlimpah dolar di kawasan wisata Kuta tersebut. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mengalami kecemasan dalam mencari pekerjaan selama ini. Masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah kecemasan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan di kawasan wisata Kuta Bali serta jenis pekerjaan yang dilakukan di kawasan wisata Kuta Bali? Dalam mengkaji masalah ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kajian budaya. Penelitian ini menghasilkan dua hal: Pertama, penyandang disabilitas mengalami kecemasan dalam mencari pekerjaan di kawasan wisata Kuta, sehingga mereka terpaksa bekerja yang kurang sesuai dengan potensi dirinya. Kedua, penyandang disabilitas terpaksa bekerja sebagai *cleaning service* dan operator CCTV di kawasan wisata Kuta. Kecemasan ini akan terus meningkat jika pemerintah dan pengusaha kurang berpihak serta memberdayakan penyandang disabilitas yang sesuai dengan potensi dirinya.

Kata kunci: kecemasan, penyandang disabilitas, kawasan wisata kuta

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tahun 2011 diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas 1.704 orang. Menurut Ida Bagus Oka Dirga selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bahwa tahun 2015 jumlah penyandang disabilitas 2.114 orang, tahun 2016 berjumlah 2.223 orang (Astiti, 2016), dan tahun 2017 meningkat menjadi 2.862 (Dinas Sosial, 2017). Penyandang disabilitas ini terbagi atas 6 kategori: tunadaksa 1.348 orang, cacat mental 705 orang,

tunanetra 270 orang, tunaganda 113 orang, tunarungu 393 orang, dan penyakit kronis 33 orang yang tersebar pada 6 kecamatan se-Kabupaten Badung (Dinas Sosial, 2017).

Istilah disabilitas terkait dengan kondisi seseorang yang mengalami kecacatan fisik ataupun mental sejak lahir maupun akibat kecelakaan. Dengan kecatatan ini membuat setiap penyandang disabilitas mendapat stigma negatif sebagai pribadi yang kurang sempurna. Akibatnya penyandang disabilitas kurang bergaul dan tidak melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat, termasuk sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai

kondisi kedisabilitasnya (Prakosa, 2005). Keberadaan penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kaum yang lemah dan mengganggu kenyamanan orang lain. Anggota keluarga yang memiliki penyandang disabilitas kadang dianggap sebagai aib atau hukuman dari Tuhan. Stigma negatif inilah yang membuat penyandang disabilitas mengalami trauma serta kecemasan untuk menjalani kehidupan sosialnya.

Kondisi penyandang disabilitas tidak selamanya lemah, kendati mereka mengalami kecacatan fisik. Ada sebagian penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan fisik maupun intelektual yang hampir sama dengan orang normal. Salah satu penyandang disabilitas yang berasal dari Bali bernama Ni Nengah Widiasih berhasil mengangkat beban 95 kg dan mendapat medali perunggu di Paralympic Games 2016 di Rio de Janeiro, Brasil (Sasongko, 2016). Keberhasilan Widiasih ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas tidak selamanya dianggap sebagai individu yang lemah, melainkan memiliki kemampuan yang setara dengan orang yang normal. Penyangkalan stigma negatif ini bisa dilakukan dengan cara memberdayakan setiap penyandang disabilitas pada kawasan wisata Kuta sesuai kemampuan dan kompetensinya masing-masing.

Pemberdayaan penyandang disabilitas sebenarnya tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak penyandang disabilitas sama dengan hak orang yang normal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas menegaskan bahwa mempunyai hak, kewajiban, dan

kesempatan yang sama seperti individu normal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) ditegaskan bahwa kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 27 ditegaskan bahwa gubernur memfasilitasi penggunaan tenaga kerja pada perusahaan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan setiap 100 orang pekerja yang sehat secara fisik.

Penerapan Perda di atas ternyata tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 Pasal 27 tentang keberpihakan kepada setiap warga negara, secara khusus penyandang disabilitas. Perda ini menunjukkan bahwa pemerintah maupun lembaga swasta (perusahaan) di Kabupaten Badung kurang memperhatikan nasib penyandang disabilitas yang berpotensi untuk bekerja di kawasan wisata Kuta. Bukti ketidakberpihakan ini terlihat dari Perda No. 9 Tahun 2015 dikeluarkan oleh Gubernur Bali yang hanya mengakomodir 1 (satu) orang penyandang disabilitas dari 100 orang karyawan yang normal. Ketidakberpihakan pemerintah dan pengusaha ini membuat setiap penyandang disabilitas cemas untuk menjalani kehidupan serta mencari penghidupannya.

Dengan adanya kebijakan ini membuat setiap penyandang disabilitas di Kabupaten Badung maupun Provinsi Bali tidak memiliki kesempatan bekerja di kawasan wisata Kuta yang terkenal selama ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang didapatkan dari pajak hotel dan restoran

terus meningkat dari tahun 2013 sekitar Rp 2,02 triliun, tahun 2014 menjadi Rp 2.47 triliun, dan tahun 2016 meningkat signifikan Rp. 4,07 triliun (Prasta, 2016). Kendati PADnya cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, namun penyandang disabilitas masih mengalami kendala dalam mendapatkan pekerjaan di kawasan wisata Kuta. Pemerintah maupun pengusaha kurang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka semakin stres menjalani kehidupannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah yang dikaji pada artikel ini adalah tentang bentuk kecemasan dan jenis pekerjaan penyandang disabilitas di kawasan wisata Kuta Bali.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung, secara khusus pada kawasan wisata Kuta. Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku orang-orang yang menjadi objek penelitian (Moleong, 2010). Metode kualitatif digunakan untuk mengamati berbagai fenomena sosial sebagai strategi pengumpulan data seperti pengalaman pribadi, wawancara, pengamatan, sejarah teks, dan sebagainya (Singarimbun, 1989; Endraswara, 2006). Semua data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara informan, dokumen-dokumen terkait lainnya (Kerlinger, 2002). Peneliti mewawancarai penyandang disabilitas, masyarakat, pemerintah, dan pengusaha yang ada di kawasan wisata Kuta serta mengumpulkan berbagai dokumen terkait dengan topik penelitian. Data dianalisis serta disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif yang diformulasikan berdasarkan kaidah ilmiah dengan pendekatan kajian budaya.

Hasil dan Bahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Badung mengalami kecemasan dalam mencari pekerjaan di kawasan wisata Kuta sehingga terpaksa bekerja sebagai cleaning service, operator CCTV, dan tukang masak (tenaga serabutan). Kecemasan ini timbul sebagai akibat dari jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat setiap tahunnya, regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan kurang berpihak terhadap penyandang disabilitas, dan lapangan kerja yang kurang sesuai dengan potensi penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Badung Tahun 2016 yaitu 2.223 orang (Astuti, 2016) dan tahun 2017 meningkat menjadi 2.862 orang yang tersebar pada 6 kecamatan se-Kabupaten Badung (Dinas Sosial, 2017). Jumlah penyandang disabilitas ini terbagi atas beberapa kategori berdasarkan tingkat dan bentuk kedisabilitasnya yaitu tunadaksa (cacat tubuh) 1.348 orang, cacat mental 705 orang, tuna netra 270 orang, tuna ganda 113 orang, tuna rungu/wicara 393 orang, dan disabilitas penyakit kronis 33 orang (Dinas Sosial, 2017). Jumlah penyandang disabilitas yang banyak ini ternyata belum memiliki pekerjaan yang sesuai potensi dirinya. Jenis penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan pekerjaan di kawasan wisata Kuta, kendati kurang sesuai dengan kondisi fisiknya yaitu tunanetra (buta sebagian) dan tunadaksa (cacat fisik).

Kecacatan fisik menjadi kendala bagi setiap penyandang disabilitas untuk mencari pekerjaan di kawasan wisata Kuta. Kondisi inilah yang membuat setiap penyandang disabilitas mengalami kecemasan untuk menjalani kehidupannya yang serba terbatas

tersebut. Kecemasan dapat diartikan sebagai keadaan emosional atau keadaan khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi bagi kehidupannya maupun lingkungannya (Nevid, dkk., 2005). Penyandang disabilitas yang mengalami kecemasan dalam mencari pekerjaan di kawasan wisata Kuta, antara lain:

a) Tunanetra (buta sebagian)

Penyandang disabilitas tunanetra (buta sebagian) yang sudah bekerja di kawasan wisata Kuta yaitu Ibu Salama. Salama mengalami kebutaan sejak bayi akibat bedak yang dioleskan oleh ibunya. Ibu Salama bekerja sebagai tenaga serabutan di restoran Batam 88 *Food Court* Udayana Kuta yang bertugas memasak air, memasak nasi, dan cuci piring (tenaga serabutan). Pekerjaan ini terpaksa dilakukan selama 3 tahun lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan biaya anak-anaknya di sekolah.

Tunanetra biasanya beradaptasi dengan mengandalkan fungsi indranya seperti perabaan, penciuman, dan pendengaran. Kendati demikian kondisinya, namun penyandang disabilitas tunanetra bisa diberdayakan menjadi penyanyi, pemain musik, dan bidang pekerjaan lainnya di kawasan wisata Kuta. Dengan kondisi fisik yang kurang sempurna dan penglihatan yang kurang jelas membuat ibu Salama melakukan pekerjaan yang beresiko untuk terbakar. Ibu Salama terpaksa menjadi tenaga serabutan sebagai pemasak air dan mendapatkan gaji yang relatif kecil.

Kecemasan Ibu Salama ini semakin bertambah ketika mengalami kecelakaan kerja di restoran tersebut. Ibu Salama tersiram air panas, sehingga kakinya terbakar dan tidak bisa bekerja selama 1 bulan. Segala biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Salama serta tidak mendapatkan gaji

selama proses kesembuhan tersebut. Kecemasan yang tinggi dapat menimbulkan frustrasi bagi setiap penyandang disabilitas (Machdan & Hartini, 2012). Kondisi ini membuktikan bahwa perhatian pemilik restoran terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Terbukti ketika Ibu Salama mengalami musibah tersiram air panas pada saat sedang bekerja, justru biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh penyandang disabilitas tersebut.

Penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah dan pengusaha. Ibu Salama terpaksa melakukan pekerjaan sebagai tenaga serabutan untuk membantu suaminya yang bekerja serabutan di Bali demi mendapatkan biaya sekolah anak-anaknya. Mereka terpaksa bekerja dengan keterbatasan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Salama mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji yang lebih besar. Apalagi secara administrasi, ibu ini bukan sebagai penduduk Provinsi Bali, melainkan berasal dari Madura, Jawa Timur. Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibutuhkan KTP Bali, sehingga bisa mengakses bidang pekerjaan yang sesuai potensi dirinya.

b) Tunadaksa (cacat fisik)

Penyandang disabilitas tunadaksa (cacat fisik) yang bekerja di kawasan wisata Kuta bernama Anto dan Wayan Nuartha. Penyandang disabilitas tunadaksa menderita kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan organ tubuh lainnya sehingga terganggu aktivitasnya untuk berkomunikasi, adaptasi, mobilisasi, serta perkembangan pribadinya (Ekawati, 2013). Penyandang disabilitas tunadaksa biasanya memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik

karena kehilangan anggota tubuhnya. Kekurangan anggota tubuh ini biasanya terjadi karena kecelakaan atau bawaan sejak lahir. Penyandang disabilitas seperti ini mengalami gangguan dari segi relasi sosial, emosi, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan (Machdan & Hartini, 2012).

Salah seorang penyandang disabilitas tunadaksa bernama Anton mengalami cacat fisik yaitu bibir sumbing. Anton terpaksa bekerja di *Food Court* Udayana Kuta karena tidak diterima bekerja di perusahaan lain. Penyandang disabilitas kurang diberdayakan pada objek wisata Kuta selama ini oleh pemerintah maupun pengusaha. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penyandang disabilitas agar bisa diterima bekerja pada objek wisata Kuta. Kondisi fisik seseorang menjadi pertimbangan pemilik dunia usaha atau penyedia lapangan kerja, sehingga penyandang disabilitas kurang mendapatkan lapangan kerja yang diinginkannya (Aji & Haryani, 2017).

Anton menggeluti pekerjaan sebagai *cleaning service* sudah berlangsung selama 5 tahun. Pekerjaan sebagai *cleaning service* merupakan sebuah profesi kerja yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sehat secara fisik. Tugas *cleaning service* adalah membersihkan lingkungan tempat kerja. Pada awalnya, penyandang disabilitas ini kesulitan mendapat pekerjaan di kawasan wisata Kuta karena biasanya karyawan atau tenaga kerja di kawasan wisata ini semuanya sehat secara fisik (bukan penyandang disabilitas). Anton sangat senang mendapatkan pekerjaan sebagai *cleaning service* karena sebelumnya menganggur selama beberapa tahun.

Hampir semua penyandang disabilitas di Kabupaten Badung mengalami nasib yang sama seperti

Anton. Setiap penyandang disabilitas sangat membutuhkan pekerjaan, tetapi sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di hotel atau perusahaan di kawasan wisata Kuta. Perlakuan yang diskrimatif terhadap penyandang disabilitas masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Aji & Haryani, 2017). Perlakuan yang diskrimatif ini terjadi juga kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Badung, secara khusus di kawasan wisata Kuta.

Pada dasarnya, penyandang disabilitas bukanlah kaum yang lemah, tetapi mereka merupakan individu-individu yang tangguh jika diberdayakan secara maksimal. Jika penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya, maka akan mengalami stres serta kecemasan yang semakin meningkat setiap harinya. Kondisi stres dan kecemasan ini timbul pada setiap penyandang disabilitas merupakan akibat dari keterbatasan fisik maupun peluang kerja yang didambakannya masing-masing.

Kecemasan yang dialami oleh Anton masih terlihat ketika peneliti mewawancarainya. Pada awalnya, Anton tidak mau diwawancarai karena merasa malu atas keterbatasan fisiknya yang menderita bibir sumbing tersebut. Penyandang disabilitas yang mengalami tunadaksa akan menimbulkan perasaan harga diri yang rendah (Efendi, 2006). Rasa cemas ini timbul sebagai akumulasi dari penolakan yang dialaminya ketika mencari pekerjaan di kawasan wisata Kuta. Perubahan yang terjadi di sekitar penyandang disabilitas dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan kecemasan dalam bergerak dan berperilaku (Machdan & Hartini, 2012).

Pada dasarnya, setiap penyandang disabilitas yang bekerja di *food court* Udayana Kuta diharuskan untuk

berbahasa Inggris. Konsumen *food court* ini biasanya melayani wisatawan mancanegara, sehingga bahasa Inggris menjadi sarana untuk berkomunikasi. Anton tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga mengalami kesulitan jika ada wisatawan mancanegara yang meminta bantuan kepadanya. Keterampilan berbahasa Inggris harus dikuasai oleh setiap penyandang disabilitas yang ingin bekerja pada objek wisata Kuta tersebut.

Penyandang disabilitas bibir sumbing mengalami kesulitan untuk berkomunikasi karena suaranya kurang jelas. Kendati demikian, hasil dari pekerjaannya tidak jauh berbeda dengan orang yang sehat secara normal. Penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di hotel maupun tempat kerja lainnya di kawasan wisata Kuta. Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas hampir sama dengan orang yang sehat secara fisik.

Penyandang disabilitas dapat diberdayakan sebagaimana orang yang sehat secara fisik. Apa yang dialami oleh Anton yang cemas karena kesulitan mendapatkan pekerjaan juga dirasakan oleh Wayan Nuartha yang mengalami cacat fisik pada kakinya. Nuartha memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer, tetapi sulit mendapatkan pekerjaan di hotel atau perusahaan di kawasan wisata Kuta. Nuartha yang merupakan alumni dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jimbaran Bali mengakui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya.

Kecemasan Nuartha bisa teratasi setelah mendapatkan pekerjaan sebagai operator CCTV di hotel Nusa Dua Beach. Pekerjaan ini didapatkan oleh Nuartha karena hotel Nusa Dua Beach

merupakan salah satu donatur Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jimbaran Bali selama ini. Pekerjaan sebagai operator sangat membantu penyandang disabilitas ini untuk membiayai hidup, keluarganya, dan bahkan membantu YPAC Jimbaran Bali tempatnya diasuh serta dilatih dahulu.

Kendati Wayan Nuartha telah diterima sebagai operator CCTV di hotel Nusa Dua Beach, namun dia mengalami kesulitan alat transportasi untuk berangkat kerja. Penyandang disabilitas ini mampu mengatasi kesulitan dan kecemasannya dengan mendesain sepeda motor khusus untuk disabilitas, sehingga dia bisa beraktivitas dan bekerja sesuai jam kerjanya. Segala biaya untuk mendesain sepeda motor ini menggunakan uang pribadinya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dan perusahaan seharusnya memikirkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap penyandang disabilitas, sehingga bisa bekerja di kawasan wisata Kuta yang terkenal dengan keunikan objek wisatanya.

Dengan melihat kemampuan setiap penyandang disabilitas yang bekerja di hotel maupun perusahaan di kawasan wisata Kuta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang hampir sama dengan masyarakat yang sehat secara fisik. Oleh sebab itu, pemerintah maupun pengusaha diharapkan untuk memberdayakan setiap penyandang disabilitas sesuai keterampilan dan potensi dirinya. Dengan adanya pekerjaan bagi penyandang disabilitas, maka mereka terhindar dari stres dan kecemasan yang berlebihan demi mencapai masa depan yang lebih baik.

Simpulan

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Badung terus meningkat setiap tahunnya. Penyandang disabilitas ini mengalami stres dan kecemasan karena kurang diberdayakan oleh pemerintah maupun pengusaha pada kawasan wisata Kuta. Kemampuan penyandang disabilitas hampir sama dengan orang yang normal jika diberdayakan secara maksimal. Penyandang disabilitas di Kabupaten Badung terpaksa bekerja serabutan, cleaning service, dan operator CCTV untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Penyandang disabilitas yang diterima bekerja di kawasan wisata Kuta kurang sesuai dengan keterampilan dan potensi dirinya. Oleh sebab itu, pemerintah maupun pengusaha diharapkan agar membuat regulasi yang berpihak kepada setiap penyandang disabilitas, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Pustaka Acuan

- Aji, A.L.D. & Haryani, T.N. (2017). Diversitas dalam dunia kerja: peluang dan tantangan bagi disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83-93. Universtas Sebelas Maret. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/16246/1306>. Diakses 12 Oktober 2018.
- Astiti, W. (2016). Berdayakan kaum disabilitas agar mandiri. <https://www.cybertokoh.com/news/2016/12/06/3293/berdayakan-kaum-disabilitas-agar-mandiri.html>. Diakses, 15 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Badung dalam angka. Badung: BPS Kabupaten Badung.
- Dinas Sosial. (2017). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Badung Tahun 2017. Badung: Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.
- Efendi, M. (2006). Pengantar psikopedagogik anak berkelainan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ekawati, E. (2013). Pengertian tuna daksa. http://erniekawati-k5113021-plbuns13.blogspot.com/2013/11/pengertian-tuna-daksa_15.html. Diakses, 7 Juni 2018.
- Endraswara, S. (2006). Metode, teori, teknik penelitian kebudayaan ideologi, epistemologi, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kerlinger, F.N. (2002). Asas-asas penelitian behavioral. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Machdan, D.M. & Hartini, N. (2012). Hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada tunadaksa di upt rehabilitasi sosial cacat tubuh pasuruan. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 1(2), 79-85. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110610179_5x.pdf. Diakses, 3 Oktober 2018.
- Nevid, dkk. (2005). Psikologi abnormal. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Pergub Bali. (2017). <https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2017/PERGUB/pergub-67-2017.pdf>. Diakses 8 Juli 2018.
- Perda Bali. (2015). http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_BALI_9_2015.pdf. Diakses 4 Juni 2018.

- Prakosa, P.W.B. (2005). Dimensi sosial disabilitas mental di komunitas semim, Yogyakarta: Sebuah pendekatan representasi sosial, *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32(2), 61-73.
- Prasta, N.G. (2016). Rancangan perubahan APBD Badung 2016 naik 6,19 persen, pendapatan dirancang Rp 4,07 Triliun. <http://badungkab.go.id/baca-berita/1274/Rancangan-Perubahan-APBD-Badung-2016-Naik-6-19-Persen--Pendapatan-Dirancang-Rp-4-07-Triliun--.html>. Diakses, 6 Agustus 2018.
- Sasongko, T. (2016). Indonesia rebut medali pertama paralimpik 2016. <http://olahraga.kompas.com/read/2016/09/09/17372061/read-brandzview.html>. Diakses 28 Juni 2018.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S.